



PENETAPAN
Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hafni Nst bin Padlan Nst, tempat dan tanggal lahir, Ujung Gading, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Sumbawa, Jorong Pasar Lama, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon I**;

Lena Marya binti Harnan, tempat dan tanggal lahir, Silaping, 20 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sumbawa, Jorong Pasar Lama, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harnan dan disaksikan oleh Ical dan Lahmuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Suci Karcita binti Hafni Nst, lahir pada tanggal 15 Agustus 2002;
 2. Lintang Akbar bin Hafni Nst, lahir pada tanggal 13 April 2011;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN, akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hafni Nst bin Padlan Nst**) dengan Pemohon II (**Lena Marya binti Harnan**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2000 di rumah orang tua Pemohon II

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan,
Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Pahrudin bin Sutang Bugis, tempat tanggal lahir, di Ujung Gading, 14 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Jawa, Jorong Brastagi, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabuapten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2000;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasamaan Barat;
- Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harnan;
- Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah lcal dan Lahmuddin;
- Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Atmaja bin Sangkutan, tempat dan tanggal lahir, di Ujung Gading, 11 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabuapten Pasaman Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2000;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasamaan Barat;
- Bahwa, wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harnan;
- Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ical dan Lahmuddin;
- Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jls.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi lainnya, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2000 di Kecamatan Ranah Batahan, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengg keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 13 Maret 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harnan, dan saksi-saksi nikahnya adalah Ical dan Lahmuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, yakni:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2000 di Kecamatan Ranah Batahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harnan dan saksi-saksi nikahnya adalah Ical dan Lahmuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 13 Maret 2000 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, permohonan penetapan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya : "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*".

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU



وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ فَلَا تَهْ رَوْجَتِيْ وَلَمْ يُفْصَلْ وَصَدَقَتْهُ الْمَرْءَةُ أَوْ
الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Batahan, pada tanggal 13 Maret 2000 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hafni Nst bin Padlan Nst**) dengan Pemohon II (**Lena Marya binti Harnan**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2000 di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Raziazna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)